

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Daftar Informan (4 halaman)

LAMPIRAN 2: Panduan Wawancara (7 halaman)



Daftar Informan-Ahli Perubahan Iklim atau CDM

No.	Nama	Organisasi/Instansi	Catatan
1.	Dra. Liana Bratasida, MS	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).JI. DI Panjaitan Kav 24 Jakarta, DKI, 13410	Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Global dan Kerjasama Internasional; Anggota EB.
2.	Dr. Lolo M Panggabean, APU	Yayasan Bina Usaha Lingkungan YBUL Jl. Hang Lekir VI No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Renewable Energy and Energy Efficiency Director
3.	Dr. Agus P. Sari	Eco Securities-Graha Niaga 17th Floor . Jalan Jenderal Sudirman Kav.58 .Jakarta 12190	Ex-Direktur Pelangi; Country Director - Eco Securities
4.	Gareth Phillips	Ex-SGS – London SGS United Kingdom Ltd. (SGS) (now Chief Climate Officer of Sindicatum Carbon Capital Ltd)	Chief Climate Change Expert. Salah satu pakar dalam UNFCCC dan CDM di dunia; telah mengerjakan banyak metodologi, verifikasi dan validasi untuk persyaratan proyek-proyek CDM bersama Executive Board PBB,
5	David Creedy	Senior Vice President-Coal Mine Methane Group Sindicatum Carbon Capital China	Tiga puluh tahun berpengalaman dalam bidang coal mine methane; 6 tahun bekerja dalam proyek-proyek CDM di China; membantu Bank Dunia di China dalam pembentukan metodologi dan strategi proyek CDM; bekerja sama dengan UNDP dalam 18 'CDM pilot projects', dll.

Daftar Informan-Organisasi Non Pemerintah / Lembaga Internasional

No.	Nama	Organisasi/Instansi	Catatan
1.	Bobur Alimov	Asian Development Bank- Indonesia Resident Mission Gedung BRI II lantai 7, Jl, Sudirman kav. 44-46	Head of Environment Unit
2.	Rehan Kaiser	Asian Development Bank- Indonesia Resident Mission Gedung BRI II lantai 7, Jl, Sudirman kav. 44-46	Head of Energy Unit
3.	Ina Binari Pranoto	Bank Dunia Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 12 th fl. Jakarta	Senior Environmental Specialist
4.	Ichihara Jun, PhD.	IGES Jakarta Office-Sentra Senayan II 14 th Fl.	Coordinator, Climate Change Advisory & Monitoring Activities in Indonesia
5	Fitrian Ardiansyah	WWF Indonesia Kantor Taman Patra Kuningan A9-Mega Kuningan-Jakarta	Head of Climate Change
6	Chandra Panjiwibowo	GTZ-German Technical Cooperation Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH- c/o Kementerian Lingkungan Hidup- Gedung B Lantai 5-Jl.DI Pandjaitan Kav.24	Advisory Services in Climate Protection - SFF Project Coordinator
7	Gustya Indriani	Yayasan Pelangi, Jl. Pangeran Antasari, No.10, Jakarta	Program and Information- Communication Manager
8	David Carew	Sindicatum Carbon Capital Wisma 46 Kota BNI, 24th floor, suite 2407 Jalan Jendral	Financial specialist & engineer, specialist on CDM 'Programmatic'

Daftar Informan-Pengembang/Pemilik Proyek

No.	Nama	Organisasi/Instansi	Catatan
1.	Zulfikar Joesoef	PT. Gasuma Federal Indonesia Pondok Pinang Center A-4. Jl. Ciputat Raya.	Direktur Operasional Proyek sedang dalam persiapan dokumen; 'Gas Flaring'
2.	Triyatno Atmodiharjo	PT Odira Energy Persada Jl. Patal Senayan No.38 Jakarta	Technical Director Proyek sudah terdaftar pada EB dan memperoleh CERs
3.	Tommas Aquino (Tommy)	PT. Titis Sampurna Jl. Sanjaya I. No. 47-49 Kebayoran Baru	Direktur Teknis Proyek sedang dalam masa persiapan dokumen
4.	Kirk Evans	CEO, South East Asia Sindicatum Carbon Capital Wisma 46 Kota BNI, 24th floor, suite 2407 Jalan Jendral Sudirman kav 1, Jakarta 10220,	Pengembang Proyek; 2 proyek terdaftar di DNA, 1 diantaranya di EB
5.	Joseph Hwang M.Sc	PT Gikoko Kogyo Indonesia, Pulogadung Industrial Estate Jl. Pulokambing Kav II, I/09 Jakarta 13930,	Director; 1 proyek terdaftar pada EB
6.	David Braithwaite	PT. Q Energy South East Asia Wisma '46 Kota BNI, 43rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Indonesia	Pengembang Proyek CDM fokus di bidang Energi dan perusahaan-perusahaan milik negara
7.	Dave Shuker	Red Wing Consultancy Arena Business Centre, Holyrood Close, Poole, UK	Pengembang Proyek CDM , fokus pada perusahaan-perusahaan BUMN

Daftar Informan-Pemerintah

No.	Nama	Organisasi/Instansi	Catatan
1.	Ir. Sulistyowati MM	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)- Jl. DI Panjaitan Kav 24	Asisten Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
2.	Gunardi	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)- Jl. DI Panjaitan Kav 24	Koordinator Sekretariat Komnas MPB
3.	Joselito Gellidon	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)- Jl. DI Panjaitan Kav 24	Staff -Sekretariat Komnas MPB
4.	Ir. Widiatmini Sih Winanti, MSi	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	Kelompok Produksi Bersih
5	Pramudya Yudhi	ESDM – Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Bertindak sebagai wakil dari ESDM untuk menghadiri rapat-rapat teknis CDM
6	Dr. Ety Ginoga	Litbang Kehutanan Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 11.	

Panduan Wawancara A
(diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian nomor 1 dan 2)

Identitas Informan

Nama Lengkap:

Jabatan dan Organisasi:

Pendidikan:

Keahlian:

Pertanyaan

1. Pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto (PK), pada tanggal 28 Juli 2004, dengan ditandatanganinya Undang Undang No. 17 Tahun 2004. Beberapa negara, misalnya Saint Lucia, Antigua, El Salvador sudah meratifikasi PK sejak tahun 1998. Negara-negara tetangga juga melakukannya lebih awal dibandingkan dengan Indonesia, misalnya Malaysia melakukannya pada tanggal 4 September 2002; Thailand-28 Agustus 2002; China-30 Agustus 2002 dan India-26 Agustus 2002.
 - a. Apakah pemerintah Indonesia lamban dalam proses ratifikasi PK?
 - b. Jika ya, mengapa pemerintah lamban dalam proses tersebut?
 - c. Apakah poin di atas menjadi faktor yang mempengaruhi lambannya pelaksanaan CDM di Indonesia?
 - d. Jika ya, mengapa hal tersebut menjadi faktor?

2. Sampai akhir tahun 2007, terdapat 12 proyek CDM dari Indonesia yang terdaftar pada *Executive Board (EB)*, dengan potensi perolehan *Credit Emission Reductions (CERs)* sebesar 2.059.693 tCO₂ per tahun (IGES,2008). Kementerian Lingkungan Hidup dalam studi yang dilakukan bersama Bank Dunia pada tahun 2001, menyatakan bahwa potensi *CERs* Indonesia adalah 25 juta CO₂ per tahun. Perhitungan optimisnya bahkan mencapai 42 juta CO₂ per tahun, selama periode komitmen pertama.

- a. Apakah jumlah proyek CDM dan *CERs* tersebut di atas tergolong sedikit?
 - b. Mengapa menurut Anda jumlah tersebut tergolong sedikit?
 - c. Faktor-faktor apa yang menyebabkannya?
 - d. Dari faktor-faktor penyebab yang Anda sebutkan, faktor-faktor apakah yang berada pada kontrol organisasi seperti yang Anda wakili, dan faktor-faktor apa yang berada di bawah kontrol pemerintah?
 - e. Jika faktor-faktor yang berada di bawah kontrol pemerintah dapat diatasi, menurut Anda, berapa banyak lagi, proyek atau *CERs* yang dapat Indonesia peroleh?
 - f. Jika faktor-faktor yang berada di bawah kontrol pemerintah dan Anda dapat diatasi, menurut Anda, berapa banyak lagi, proyek atau *CERs* yang dapat Indonesia peroleh?
3. Pemerintah memutuskan untuk mendelegasikan otoritas dalam melaksanakan CDM kepada KLH.
- a. Melihat struktur perindustrian di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan energi dan gas serta pemberdayaan sumberdaya alam, apakah lembaga di atas cocok untuk mengemban otoritas tersebut?
 - b. Apakah KLH memiliki dan/atau dilengkapi dengan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan mandat CDM, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal?
 - c. Jika tidak, sumberdaya apa yang seharusnya diberikan kepada KLH?
 - d. Apakah KLH memiliki dukungan politik yang cukup untuk melaksanakan mandat CDM?
4. Komisi Nasional Pembangunan Bersih (KN-MPB) atau DNA di bawah KLH, sesuai dengan mandatnya, bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat persetujuan proyek CDM yang telah memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian badan ini pula yang dianggap bertanggung jawab atas cepat lambannya pelaksanaan CDM di Indonesia.
- a. Menurut Anda, apakah KN-MPB harus mengemban tanggung jawab tersebut?

- b. Jika ya, mengapa; dan jika tidak mengapa, serta siapa yang harus bertanggung jawab?
5. Komisi Nasional MPB, memiliki tugas utama untuk melakukan penilaian atas proposal atau rencana proyek CDM, menyetujuinya proposal proyek tersebut, dan melakukan *tracking* serta pelaporan ke sekretariat UNFCCC.
- a. Menurut Anda, apakah KN-MPB sudah melakukan tugas-tugasnya dengan optimal terutama yang berhubungan dengan proses registrasi proyek CDM?
- b. Jika ya mengapa; dan jika tidak, mengapa?
- c. Jika Anda dapat merubah sesuatu dalam pelaksanaan registrasi proyek CDM di Indonesia, apa yang Anda rubah?
6. Proposal proyek yang telah disetujui oleh KN-MPB, kemudian harus melalui berbagai prosedur untuk sampai pada dikeluarkannya *CERs*. Beberapa proses yang harus dilalui diantaranya adalah registrasi, akreditasi, *review akreditasi*, validasi dan pengeluaran *CERs*. Proses tersebut rata rata selesai dalam waktu 1 tahun atau lebih.
- a. Menurut Anda, apakah proses tersebut menjadi faktor dominan yang mempengaruhi lambannya pelaksanaan CDM di Indonesia?
- b. Jika ya, bagaimana Anda menjelaskan situasi yang terjadi di negara-negara lain, terutama yang saat ini mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam CDM seperti Cina dan India, bahkan Malaysia?
7. Keterlibatan investor dan donor Asing banyak membantu di dalam mempercepat pelaksanaan CDM di suatu negara. Menurut Anda, apakah iklim investasi dan bisnis di Indonesia yang dianggap tidak kondusif terhadap investasi asing, menjadi faktor penghambat masuknya para investor?
8. Kondisi-kondisi apa yang perlu ada bagi Anda dan pelaku CDM lainnya, untuk dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari CDM?
9. Mengenai pandangan Anda tentang perubahan iklim dan pelaksanaan CDM.

- a. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan pemerintah?
 - b. Apakah Anda berpendapat bahwa komunikasi yang ada dengan pemerintah, memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan CDM?
 - c. Jika ya, apakah hasil komunikasi tersebut mempengaruhi perolehan CERs atau jumlah proyek CDM?
 - d. Jika tidak, seberapa banyak lagi proyek CDM yang dapat dikembangkan di Indonesia jika pemerintah mengimplementasikan pendapat-pendapat atau rekomendasi Anda atau organisasi Anda?
10. Kriteria-kriteria apa menurut pandangan Anda, sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan CDM di Indonesia?
11. Fakta bahwa jumlah CERs dari proyek CDM yang terdaftar sedikit, apakah relevan dengan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria tersebut?
12. Faktor-faktor lain apakah yang mempengaruhi lambannya pelaksanaan CDM di Indonesia? dan Mengapa?

Catatan Panduan Wawancara A

Informan Penelitian	Nomor pertanyaan yang akan diajukan :
Pakar	1, 2a-c, 3, 4, 5, 6a-b, 7, 10, 11, 12
Pemerintah	1, 2a-c, 3, 5, 6a-b, 7, 8, 12
Swasta	1, 2a-f, 3, 4, 5, 6a, 7, 8, 12
LSM	1, 2a-f, 3, 4, 5, 6a-b, 7, 9, 10, 11, 12

Panduan Wawancara B.
(diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian nomor 3)

Identitas Informan

Nama Lengkap:

Jabatan dan Organisasi:

Pendidikan:

Keahlian:

1. Mekanisme Pembangunan Bersih atau CDM menyediakan sarana bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat-manfaat: ekonomi (investasi asing, pendapatan dari penjualan kredit karbon, atau penjualan tenaga listrik dari hasil penurunan emisi GRK); teknologi (alih teknologi bersih); pendidikan (alih keahlian yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bersih); industri (peningkatan efisiensi operasional) atau manfaat yang diperoleh oleh lingkungan (peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup).
 - a. Manfaat-manfaat yang manakah, jika ada, yang Anda percayai Indonesia sudah memperolehnya?
 - b. Menurut Anda, apakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh manfaat-manfaat CDM tersebut sudah optimal?
 - c. Jika belum, manfaat-manfaat CDM manakah yang dapat Indonesia peroleh dengan upaya-upaya optimal dari pemerintah?
 - d. Menurut Anda, apakah manfaat-manfaat tersebut dapat diperoleh hanya melalui mekanisme CDM, atau memerlukan usaha diplomatik lainnya, paralel dengan CDM, melalui UNFCCC?
 - e. Perubahan apa saja yang diperlukan untuk membuat upaya-upaya pemerintah dalam memperoleh manfaat-manfaat dari CDM optimal?

2. Pemerintah telah mendelegasikan mandat untuk melaksanakan CDM kepada KLH.

- a. Menurut Anda, apakah lembaga ini cocok untuk mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan CDM, sehingga Indonesia dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari CDM?
 - b. Jika tidak, lembaga mana yang Anda rekomendasikan?
3. Sampai sejauh mana upaya-upaya pemerintah dapat memengaruhi perolehan manfaat optimal dari CDM bagi Indonesia?
4. Berapa besar hasil perolehan manfaat-manfaat dari CDM berada di luar jangkauan pemerintah?, misalnya pengaruh pasar internasional atau keinginan investor asing sebagai sumber keuangan, teknologi serta para ahli untuk melakukan bisnis di Indonesia?
5. Menurut Anda, apakah mandat untuk melaksanakan CDM dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya atas CDM bagi Indonesia, memiliki dukungan dan komitmen politik yang cukup?, Jika tidak, mengapa?; Pada tingkatan mana dukungan dan komitmen tersebut seharusnya ada?
6. Seberapa besar Pembangunan Kapasitas Nasional di Indonesia (*Indonesia's National Capacity Building*) mendapatkan manfaat dari upaya-upaya pemerintah untuk memperoleh manfaat-manfaat dari CDM?
7. Secara khusus, menurut Anda, apakah upaya-upaya pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan aspek-aspek perubahan iklim sudah optimal?
8. Kebijakan atau strategi apa yang menurut pengamatan Anda saat ini belum dijalankan oleh pemerintah, dan perlu dilakukan guna mengoptimalkan upaya-upaya pemerintah dalam memperoleh manfaat CDM sebesar-besarnya?
9. Sejauh mana, menurut Anda, upaya-upaya pemerintah akan optimal jika mereka mengadopsi rekomendasi-rekomendasi dari Anda/organisasi Anda?, Seberapa besar perubahan penambahan perolehan manfaat dari CDM akan terjadi

Catatan Panduan Wawancara B

Informan Penelitian	Nomor pertanyaan yang akan diajukan :
Pakar	1a-e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pemerintah	1a-d, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Swasta	1a-d, 2, 3, 4, 5, 6, 8
LSM	1a-d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

